



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

JALAN LINTAS SUMBAWA, TALABIU, WOHA, BIMA-NTB
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skipmbima@kkp.go.id

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16
Di Jakarta

SURAT PENGANTAR
Nomor B.168/SKIPM.BIM/TU.210/VII/2025

No.	Naskah dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Stasiun KIPM Bima	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penerima
Nama Jabatan

Tanda tangan dan cap dinas

Nama Lengkap
Diterima tanggal, 2005
No. HP

Bima, 8 Juli 2025
Pengirim
Kepala Stasiun KIPM Bima,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Jonison Petrus

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Jalan Lintas Sumbawa Talabiu, Woha, Bima, Nusa Tenggara Barat



ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-bima

@bppmhkp_bima

@bppmhkp.bima

@bppmhkp.bima



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 Stasiun KIPM Bima merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Bima atas kinerja pencapaian kerjanya pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Stasiun KIPM Bima untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pencapaian tingkat kinerja instansi pemerintah menjadi tolok ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat/publik. Laporan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun Anggaran 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi publik dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 Stasiun KIPM Bima tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Bima Tahun Anggaran 2025. Secara umum, pada tahun 2025 seluruh target sasaran strategis dan target kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Semoga penyajian LKj Triwulan II Tahun 2025 Stasiun KIPM Bima ini mampu menjadi pijakan dan bahan pertimbangan bagi segenap pegawai Stasiun KIPM Bima untuk dapat mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar kinerja ke depan lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bima, 1 Juli 2025
Kepala Stasiun KIPM Bima,



Jonison Petrus

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 113.38 %.

Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Bima. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Dari hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat 6 Indikator Kinerja yang capaiannya telah memenuhi target, sementara 1 Indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Uraian dan sasaran capaian dari 7 (Tujuh) Indikator tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	100	120
		2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	100	120
		3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	99	100	101,01
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4 Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100	-	-
		5 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)	87	87,83	117,11
		6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	85	100	117,65
		7 Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	88	91,96	104,50

Keterangan : Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

Terdapat 6 indikator kinerja yang belum tercapai target, untuk itu dalam pelaksanaan tugas fungsi dan tanggungjawab selanjutnya akan dilakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi serta mengkomunikasikan program sesuai rencana yang ditetapkan.

Selain itu juga dengan melaksanakan manajemen resiko, terutama untuk program kerja bersifat prioritas, sehingga resiko yang akan dihadapi dapat diproyeksi, dimitigasi, sehingga kesempatan pencapaian tujuan dan target kinerja menjadi lebih besar.

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Tidak terdapat realisasi anggaran belanja pada satuan kerja Stasiun KIPM Bima Triwulan II pada Tahun Anggaran 2025. Dikarenakan pada tahun anggaran 2025 Stasiun KIPM Bima sudah tidak memiliki DIPA.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	11
2.1 CAPAIAN KINERJA	6
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI	8
BAB III PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun 2025	5
Tabel 2.1. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun 2025	7
Tabel 2.2.1. Target dan Realisasi IKS 1 Tahun 2025	9
Tabel 2.2.2. Target dan Realisasi IKS 2 Tahun 2025	10
Tabel 2.2.3. Target dan Realisasi IKS 3 Tahun 2025	11
Tabel 2.2.4. Target dan Realisasi IKS 02.1 Tahun 2025	18
Tabel 2.2.5. Target dan Realisasi IKS 02.2 Tahun 2025	19
Tabel 2.2.6. Target dan Realisasi IKS 02.3 Tahun 2025	20
Tabel 2.2.7. Target dan Realisasi IKS 02.4 Tahun 2025	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima Tahun 2025	3
Gambar 1.2. Peta Strategis Stasiun KIPM Bima Tahun 2025	4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu, Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil hayati ikan yang akan di Konsumsi manusia atau masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Bima dituntut untuk melaksanakan secara *prudent, transparan, akuntabel, efektif* dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Bima. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Bima. Selain memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Visi

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.

Misi

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

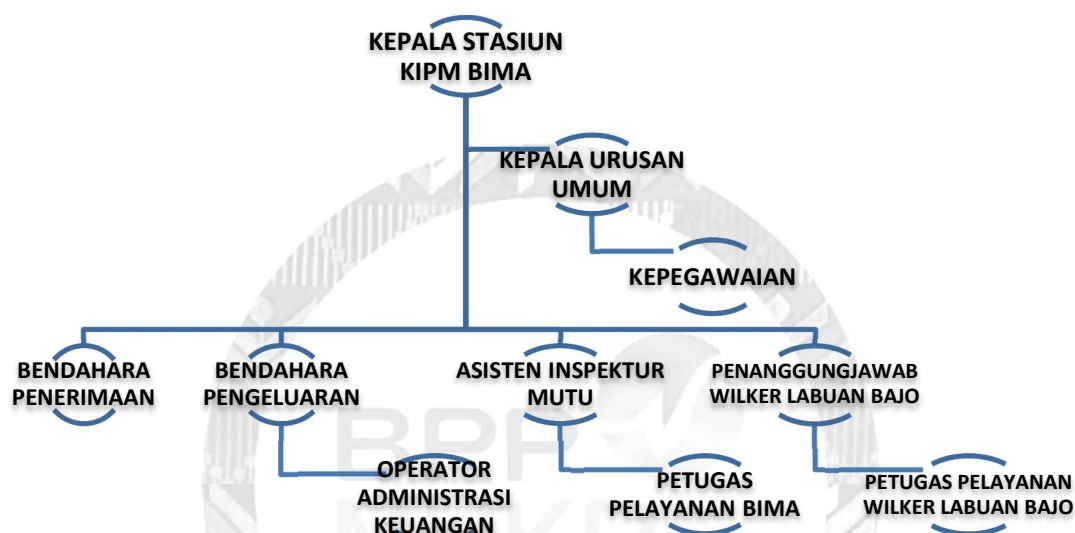
Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Bima mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun KIPM Bima menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c) Pelaksanaan administrasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bima;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Bima, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun KIPM Bima saat ini berjumlah 13 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 5 orang di kantor Stasiun KIPM Bima dan 1 orang di Wilayah Kerja Labuanbajo, yang dibantu oleh 7 tenaga kontrak. Distribusi pegawai tidak seimbang namun tetap harus membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.



Gambar 1.1

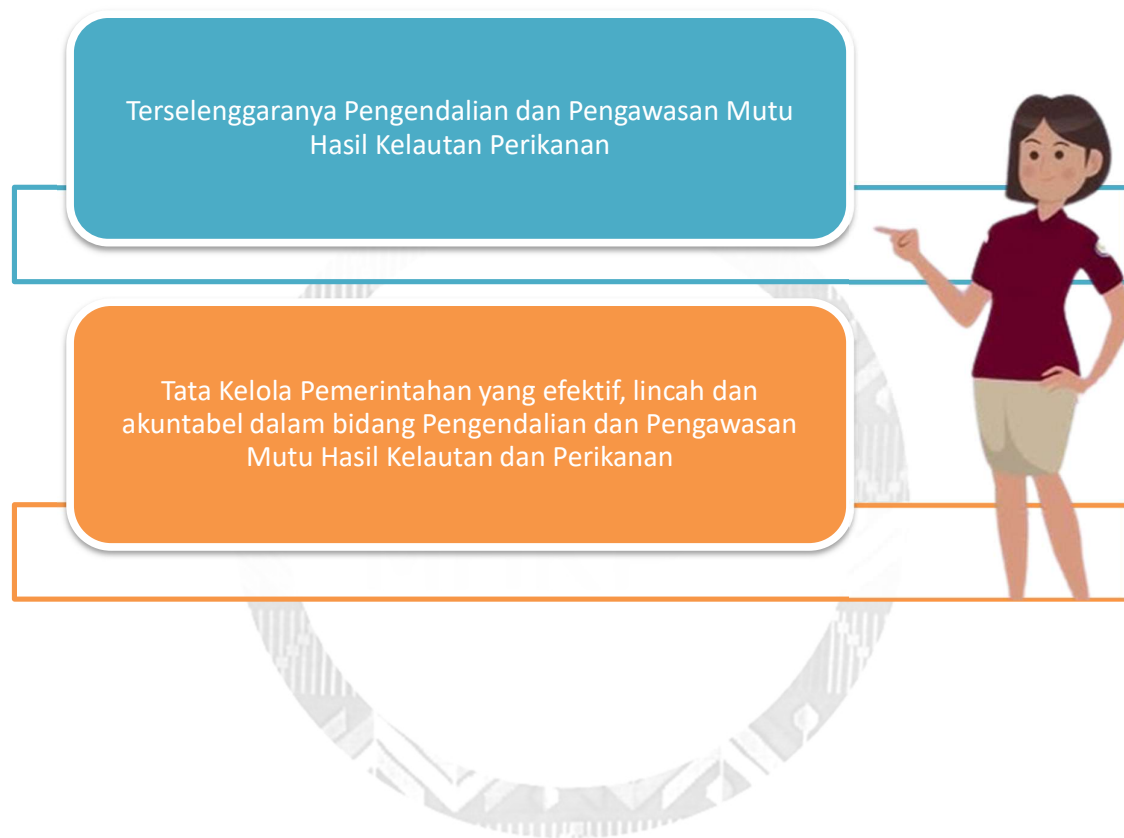
Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima (SOTK sementara)

1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Stasiun KIPM Bima dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Bima tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.2
Peta Strategis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima Tahun 2025



Tabel. 1.1
Penetapan Kinerja
Stasiun KIPM Bima Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)	99
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	100
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	87
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	85
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	88

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

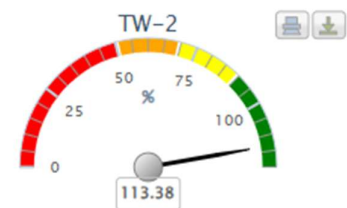
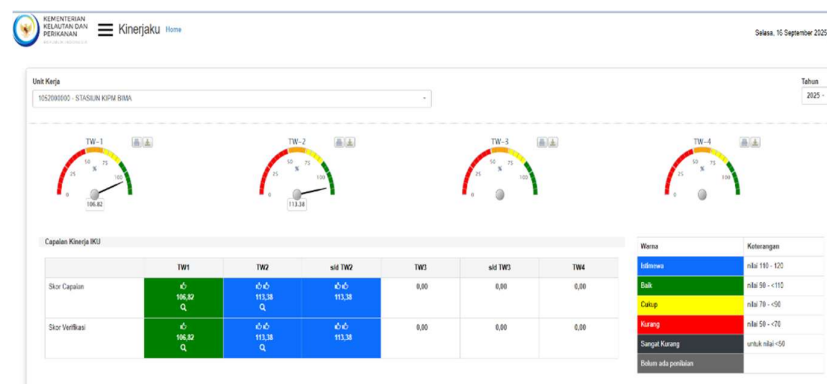
2.1 Capaian Kinerja

Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggungjawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bima merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Bima. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup organisasi, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai Capaian kinerja Stasiun KIPM Bima Triwulan II Tahun 2025 melebihi 100 yaitu Istimewa, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKM sebesar 113,38 %. Capaian Kinerja IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian Kinerja IKU Stasiun KIPM Bima Triwulan II Tahun 2025 ini capaiannya sudah tercapai maksimal. Namun masih adanya beberapa indikator kinerja yang pengukuran pencapaiannya belum dilakukan kegiatan. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang sangat baik pada masing-masing sasaran strategis.



Capaian Kinerja Stasiun KIPM Bima pada Tahun 2025
seperti pada gambar

Tabel 2.1

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN TW II
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	100
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	100
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)	99	100
3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	100	-
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	87	87,83
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	85	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	88	91,96

2.2 Analisis dan Evaluasi

Sebagai analisis dan evaluasi untuk Capaian kinerja pada Stasiun KIPM Bima meliputi 2 Sasaran Strategi.

Sasaran Strategis 01. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.

IKS.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak

pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Stasiun KIPM Bima saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Pada Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Bima hanya melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu :

a. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB).

Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. Kegiatan CBIB dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu UD.Furqan Farm di Kota Bima. Surveilen CBIB ini dilaksanakan oleh inspektur BPPMHKP Bima Bersama Penyuluh Perikanan wilayah Kota Bima. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah pembesaran ikan air tawar di kolam (Kode KBLI 03229) dengan komoditas ikan lele.

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E}{xn} \times 100 \%$$

Keterangan :

- %X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
- A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Jumlah Unit menerapkan CPIB
- C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- Xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

$$\%X = \frac{A}{xn} \times 100\% = \%X = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Output dari kegiatan ini terdiri dari :

- a. 1 Surat Keterangan Hasil Surveilans UD. Furqan Farm

Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

1. Pada tanggal 18 Juni 2025 Inspektur Mutu BPPMHKP Bima melakukan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima guna menggali informasi terkait pembudidaya, lokasi pembenihan, dan nelayan di Kota Bima guna melakukan percepatan sertifikasi Primer;



2. Pada tanggal 25 Juni 2025 Inspektur Mutu BPPMHKP Bima telah melaksanakan surveilen CBIB;



3. Pada tanggal 30 Juni 2025 Inspektur Mutu BPPMHKP Bima mendampingi pengguna jasa guna mempercepat penerbitan sertifikat CBIB.



Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi CBIB di Triwulan II Tahun 2025

No.	Nama UPR	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	UD. Furqan Farm	Pembesaran Ikan Air Tawar di kolam	C	ID - CBIB - NB - T – 000728 Tanggal 29 November 2023

Pada tahun 2025, kegiatan CBIB telah dilakukan kegiatan untuk mencapai target jumlah sertifikat yang dicapai. Berikut indikatornya :

Tabel 2.2.1
Target dan Realisasi IKS.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	100	120

IKS.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Stasiun KIPM Bima melaksanakan pengawasan dan pembinaan mutu serta keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan pada tahap pasca panen, mencakup proses penanganan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa produk perikanan yang beredar telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sesuai standar nasional maupun internasional.

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan sarana dan prasarana, pengecekan kelayakan operasional unit pengolahan, verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, serta pengujian laboratorium. Upaya ini diharapkan mencegah penurunan kualitas produk akibat penanganan yang kurang tepat setelah proses panen.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hal ini mencerminkan keberhasilan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Stasiun KIPM Bima.

Dengan capaian ini, produk perikanan dari Bima tidak hanya terjamin aman dikonsumsi, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun ekspor. Ke depan, Stasiun KIPM Bima akan terus memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk menjaga dan meningkatkan persentase pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan di sektor pasca panen.

Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh:

1. Pembinaan teknis intensif kepada pelaku usaha pengolahan terkait penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
2. Penguatan pengawasan terhadap rantai distribusi dan penyimpanan produk perikanan;
3. Peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk hingga ke tangan konsumen.

Pada tahun 2024, capaian sebesar 70% sedikit di bawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan indikator ini merupakan salah satu fokus baru yang mulai diterapkan secara penuh pada akhir tahun, sehingga waktu pelaksanaan pengawasan relatif terbatas. Namun demikian, capaian tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk pencapaian target yang lebih tinggi di tahun 2025, yang berhasil mencapai 100%.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen terdiri dari :

a. Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) :

- Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha

industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan;

- Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk produk perikanan adalah suatu sistem jaminan keamanan pangan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi produk perikanan;
- Tujuan HACCP adalah untuk memastikan keamanan pangan produk perikanan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi.

b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) :

- Sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan ikan (UPI. Upi yang dimaksud antara lain :
 1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
 2. Unit penanganan rumput laut kering;
 3. Gudang beku;
 4. Gudang dingin;
 5. Gudang kering, dan/atau
 6. Miniplant
- Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik (Online Single Submission)/ Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) atau Sertifikat keterampilan di bidang Keamanan Pangan yang setara untuk penanggungjawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil);

- 2) Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019);
- 3) Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Pada Triwulan II tahun 2025 BPPMHKP Bima terdapat realisasi capaian kinerja berupa Sertifikasi HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

Keterangan :

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- Xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\% = \%X = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Output dari kegiatan ini terdiri dari :

- a. 1 Surat Keterangan Hasil Surveilen PT. Berkas Nisa Sura Bima

Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

Tabel 1. Kegiatan yang telah dilaksanakan

I. SKHS HACCP di Triwulan II Tahun 2025

No.	Nama UPI	Produk	Grade	Nomor Sertifikat
1	PT. BERKAT NISA SURABIMA	Dried Seaweed	B	1/30.0/SKV/04/25

DOKUMENTASI KEGIATAN :



II. Daftar Sertifikasi SKP di Triwulan II Tahun 2025

No.	Nama UPI	Produk	Grade	Nomor Sertifikat
1	CV. TOYO MILI LUMINTU	Ikan Pelagis Beku	A	35741/52/SKP/BK/II/2025
2	CV. TOYO MILI LUMINTU	Cephalopoda Mentah Beku	A	35742/52/SKP/BK/II/2025
3	CV. TOYO MILI LUMINTU	Ikan Demersal Beku	A	35743/52/SKP/BK/II/2025
4	CV. TOYO MILI LUMINTU	Tuna Loin Beku	A	35744/52/SKP/BK/II/2025
5	CV. TOYO MILI LUMINTU	Crustacea Beku	A	35745/52/SKP/BK/II/2025

Untuk kegiatan Pasca Panen pada tahun 2025 Triwulan II sudah dilakukan kegiatan, sehingga target pencapaiannya sudah terlaksana. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.2.2

Target dan Realisasi IKS.2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	100	120

IKS.3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Pada semester pertama tahun 2025, produk perikanan Indonesia telah diterima di 1 negara dari total 3 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perikanan Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Target indikator kinerja utama (IKU) tahun 2024 memang ditetapkan pada angka 1 negara, yang berarti hingga pertengahan tahun, target tersebut sudah berhasil tercapai. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu 2 negara pada tahun 2024, terjadi penurunan jumlah negara tujuan ekspor. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan regulasi impor di beberapa negara, persaingan global yang semakin ketat, atau tantangan dalam pemenuhan standar mutu di beberapa pasar tertentu.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Jumlah Sertifikat Ekspor ke Negara Tujuan Tahun 2024 dan 2025

No	Bulan	Jumlah Sertifikat Diterbitkan 2024	Jumlah Sertifikat Diterbitkan 2025
1	Januari	38 Sertifikat	1 Sertifikat
2	Februari	28 Sertifikat	4 Sertifikat
3	Maret	19 Sertifikat	3 Sertifikat
4	April 2	9 Sertifikat	3 Sertifikat
5	Mei 2024	15 Sertifikat	1 Sertifikat
6	Juni 2024	35 Sertifikat	-
7	Juli 2024	16 Sertifikat	3 Sertifikat
Total		160 Sertifikat	15 Sertifikat

*Data hingga 31 Juli 2025

Pada periode Januari hingga Juli 2025, jumlah Sertifikat Ekspor ke Negara Tujuan yang diterbitkan oleh Stasiun KIPM Bima menunjukkan tren penurunan signifikan dibanding periode yang sama tahun 2024. Tercatat sebanyak 15 sertifikat ekspor telah diterbitkan pada tahun 2025, terjadi penurunan sebesar 90,63% dari tahun 2025 dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Penurunan jumlah sertifikat ekspor pada tahun 2025 di Stasiun KIPM Bima, jika dibandingkan dengan tahun 2024, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. **Kondisi Produksi Perikanan** : Hasil tangkapan nelayan mengalami fluktuasi akibat perubahan musim penangkapan, cuaca ekstrem, serta keterbatasan ketersediaan bahan baku yang berdampak langsung pada volume produksi;
2. **Permintaan Pasar Internasional** : Terjadi penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor karena faktor persaingan harga, standar mutu yang lebih ketat, serta dinamika perdagangan global;
3. **Penerapan Regulasi dan Standar Mutu** : Beberapa Unit Pengolahan Ikan (UPI) masih menghadapi kendala dalam pemenuhan persyaratan teknis dan standar mutu internasional, sehingga memerlukan waktu penyesuaian;
4. **Faktor Logistik dan Distribusi** : Kendala biaya pengiriman, ketersediaan kontainer, serta jalur distribusi yang belum optimal turut mempengaruhi kelancaran ekspor;
5. **Aspek Internal dan Administratif** : Perubahan pola produksi, keterbatasan fasilitas, serta proses administrasi ekspor yang membutuhkan penyesuaian menyebabkan penurunan jumlah sertifikasi;

Peta ekspor menunjukkan bahwa produk perikanan Indonesia tersebar ke berbagai wilayah utama dunia, termasuk Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada), Eropa (seperti Inggris, Belanda, Belgia, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Italia), Asia (China, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura), Timur Tengah (Arab Saudi), serta Oseania (Australia). Hal ini mengindikasikan bahwa produk perikanan Indonesia telah berhasil masuk ke berbagai pasar strategis dunia, terutama di negara-negara dengan permintaan tinggi terhadap produk perikanan. Untuk menjaga dan meningkatkan keberterimaan produk perikanan di pasar global, diperlukan strategi yang lebih agresif dalam mempertahankan serta memperluas pangsa pasar, terutama di negara-negara yang mengalami penurunan impor dari Indonesia. Selain itu, peningkatan kualitas, pemenuhan standar keamanan pangan internasional, serta diversifikasi produk ekspor perlu terus dilakukan agar dapat kembali mencapai atau bahkan melampaui capaian ekspor pada tahun sebelumnya.

Target yang direncanakan pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan dan sudah mencapai target realisasi dalam indikator pencapaiannya. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.2.3
Target dan Realisasi IKS.3 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	99	100	101,01

Sasaran Strategis 02. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK.02.1 Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

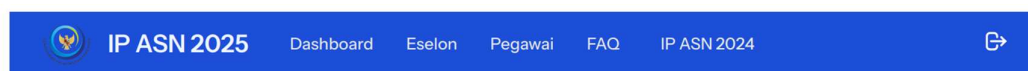
Pada Triwulan II tahun 2025, indikator Presentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Bima belum tercapai.

Tabel 2.2.4
Target dan Realisasi IK.02.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	100	-	-

IKS.03.1 Indeks Profesionalitas ASN dilingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).



STASIUN KIPM BIMA			Cari									
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM BIMA	6	23.33	93.32 %	35	87.5 %	25	83.33 %	4.5	90 %	87.83	TINGGI

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu/D-4 (Diploma-Empat)

d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)

e. Pendidikan dibawah SLTA

3. Kompetensi

a. Diukur dari indicator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir .

b. Diukur dari Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat.

IP ASN 2025 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024															
Silakan ketik NIP atau Nani Cari Download															
troubleshooting permasalahan IP-ASN bisa dicek pada halaman berikut: faq-troubleshooting-permasalahan-ip-asn															
#	Nama	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan
		Tingkat Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukuman Disiplin	IP		
1	JONISON PETRUS	S-1	25	20	10	-	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
2	KUKUH ANDIAS PURBIANTO	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	S	2	82	TINGGI
3	FITRA ADITYAWARMAN	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
4	DITA ANTONISA WIELNA	D-III	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
5	NURWAHYUNI WIDIASTUTI	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
6	HERI PURWANTO	S-1	25	20	10	-	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI

Dari penghitungan semua komponen tersebut, berikut capaian Triwulan II atas indikator IP ASN Stasiun KIPM Bima.

Tabel 2.2.5
Target dan Realisasi IKS.02.2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Indeks Profesionalitas ASN	87	87,83	117,11

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara (IP ASN) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima tahun 2025 telah tercapai dari target sebesar 87 tercapai 87,83 di tahun 2025. Hal ini dapat di lihat pada system informasi kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan secara online.

IKS.02.3 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Indikator ini adalah menghitung persentase dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jendral sebagai APIP sebagai hasil temuan dari pengawasan/evaluasi, dan menghitung tindak lanjut dari satker dalam menuntaskan temuan/rekomendasi ini.

Pada tahun 2021 Stasiun KIPM Bima telah dievaluasi sebanyak 2 kali oleh Itjen KKP atas pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pekerjaan ini dievaluasi pada bulan September, kemudian dilakukan evaluasi Kembali di bulan Desember. Pekerjaan konstruksi menjadi perhatian karena adanya reconfusing anggaran, yang membuat pekerjaan menjadi tidak bisa dibayarkan penuh pada tahun anggaran berjalan, namun dilakukan secara carry over.

Dari dua kali evaluasi oleh Itjen dikeluarkan 2 LHP dengan total terdapat 5 rekomendasi. Dari 5 rekomendasi tersebut, semua telah dilakukan tindak lanjut menjawab rekomendasi yang diberikan. Atas tercapainya 5 tindak lanjut atas rekomendasi ini, maka diperoleh capaian THLP sebesar 100%.

Namun pada tahun 2025, tidak melakukan pekerjaan konstruksi sehingga pada tahun tersebut tim pengawas dan pemeriksa tidak melakukan kunjungan di Stasiun KIPM Bima.

Tabel 2.2.6
Target dan Realisasi IKS.02.3 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima	85	100	117,65

IKS.02.1 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Stasiun KIPM Bima pada periode Triwulan II tahun 2025, diperoleh nilai IKM sebesar 91,96 persen dan kategori mutu A yang berada pada kategori “Sangat Baik”. Penilaian melibatkan 19 responden, yang memberikan apresiasi positif terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Survei ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, meliputi aspek persyaratan layanan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, kompetensi petugas, perilaku petugas, penanganan pengaduan, sarana prasarana, dan kemudahan akses informasi.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai pelayanan Stasiun KIPM Bima telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi, khususnya pada aspek ketepatan waktu layanan, keramahan petugas, serta kejelasan informasi. Namun demikian, terdapat beberapa masukan yang perlu menjadi perhatian, di antaranya peningkatan fasilitas pendukung dan optimalisasi saluran pengaduan masyarakat.

Dengan capaian nilai IKM ini, Stasiun KIPM Bima berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sarana prasarana, serta inovasi layanan berbasis digital, sehingga pelayanan yang diberikan semakin cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

Tabel 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan Stasiun KIPM Bima

Indikator	Nilai	Kategori
Nilai Mutu Pelayanan	91,96	Sangat Baik
Mutu Pelayanan	A	-
Jumlah Responden	3,67	-
Rata-rata Unsur Pelayanan		
Persyaratan Layanan	94,74	Sangat Baik
Kemudahan Prosedur	96,05	Sangat Baik

Waktu Penyelesaian	90,79	Sangat Baik
Kesesuaian Biaya	88,16	Baik
Kesesuaian Produk	89,47	Sangat Baik
Kompetensi Petugas	90,79	Sangat Baik
Perilaku Petugas	93,42	Sangat Baik
Layanan Konsultasi	93,42	Sangat Baik
Fasilitas Pelayanan	90,79	Sangat Baik



Predikat Sangat Baik untuk hasil survei IKM lingkup Stasiun KIPM BIMA Triwulan II Tahun 2025 ini dapat dicapai dikarenakan meningkatnya kepatuhan responden dalam mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat. Stasiun KIPM Bima tetap konsisten melakukan perubahan dan peningkatan pada setiap unsur pelayanan baik petugas pelayanan, sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan yang dikemas melalui salah satu bentuk pelayanan yaitu "Pelayanan SIAP". Seluruh Pegawai lingkup Stasiun KIPM BIMA juga telah berkomitmen untuk melaksanakan "Pelayanan SIAP", sesuai dengan kebijakan, standard dan prosedur-prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dengan penandatanganan pakta integritas. Stasiun KIPM BIMA juga telah menerapkan beberapa sistem manajemen yang mengacu kepada standar internasional untuk mendukung peningkatan kinerja layanan dengan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017. Berikut pencapaian indikatornya :

Tabel 2.2.7
Target dan Realisasi IKS.02.4 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima	88	91,96	104,50



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Bima tahun 2025 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Bima pada tahun anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target Triwulan II dan target Renstra tahun 2025-2029 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Secara umum, capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Bima yang diperjanjikan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan adanya konsistensi kinerja, komitmen yang kuat, serta kerja sama yang baik dari seluruh jajaran pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini juga menjadi wujud nyata dari upaya Stasiun KIPM Bima dalam melaksanakan mandat untuk menjaga mutu, keamanan hasil perikanan, serta kelancaran arus lalu lintas komoditas perikanan di wilayah kerja.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025, masih ditemui sejumlah kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Kendala tersebut, meskipun tidak menghambat pencapaian target secara keseluruhan, tetap memberikan pengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan program. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai yang tersedia masih terbatas bila dibandingkan dengan beban kerja dan cakupan wilayah pengawasan. Selain itu, kompetensi pegawai pada bidang tertentu masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas agar lebih optimal dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin kompleks.

2. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana

Dukungan anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional, terutama untuk kegiatan yang membutuhkan biaya besar seperti mobilisasi lapangan, pengawasan lintas wilayah, maupun pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang. Keterbatasan fasilitas kerja, baik dari sisi teknologi maupun infrastruktur, juga menjadi tantangan tersendiri dalam menunjang efektivitas program.

3. Kondisi Geografis dan Aksesibilitas Wilayah

Sebagian besar lokasi kegiatan pengawasan, inspeksi, maupun pelayanan berada di daerah terpencil dengan akses transportasi yang sulit. Kondisi geografis ini menyebabkan kebutuhan waktu dan biaya yang lebih besar untuk menjangkau lokasi, serta berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Faktor Eksternal

Perubahan kebijakan, dinamika pasar global, serta faktor cuaca ekstrem memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program. Misalnya, terganggunya jadwal ekspor akibat kondisi cuaca maupun adanya penyesuaian regulasi dari negara mitra dagang, yang berdampak pada pelayanan ekspor dan pengawasan mutu hasil perikanan.

5. Koordinasi dan Kolaborasi Antar Pihak

Meskipun koordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha, serta masyarakat telah berjalan cukup baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan sinergi. Beberapa kegiatan strategis memerlukan dukungan lintas sektor, sehingga koordinasi yang lebih intensif dan kolaborasi yang lebih solid masih menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat efektivitas program di lapangan.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut serta meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya, Stasiun KIPM Bima merumuskan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas SDM

- Mengusulkan penambahan formasi pegawai sesuai kebutuhan teknis dan administratif.

- Melaksanakan program peningkatan kompetensi melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi teknis.
- Mendorong peningkatan keterampilan pegawai dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efektivitas kerja.

2. Optimalisasi Anggaran dan Sarana Prasarana

- Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran melalui perencanaan yang lebih tepat sasaran.
- Mengusulkan penambahan dukungan anggaran untuk program prioritas, khususnya pengawasan dan pelayanan ekspor.
- Melakukan perawatan rutin serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung berbasis teknologi.

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Efisiensi Mobilisasi

- Menyusun strategi penjadwalan kegiatan lapangan yang lebih terintegrasi untuk mengurangi biaya mobilisasi.
- Memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta terkait dukungan transportasi ke wilayah terpencil.

4. Antisipasi Faktor Eksternal

- Meningkatkan sistem pemantauan dan mitigasi risiko terhadap cuaca ekstrem dan dinamika pasar global.
- Menjalin komunikasi lebih intensif dengan mitra dagang internasional guna meminimalisir dampak perubahan regulasi.

5. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi

- Memperkuat sinergi dengan instansi terkait, asosiasi pelaku usaha, dan masyarakat melalui forum komunikasi rutin.
- Mengembangkan program kolaboratif yang berbasis pada kebutuhan bersama, khususnya dalam pengawasan mutu hasil perikanan dan dukungan ekspor.

Dengan adanya rekomendasi dan langkah tindak lanjut tersebut, diharapkan Stasiun KIPM Bima dapat semakin meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat peran strategis dalam menjaga mutu hasil perikanan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja pada tahun-tahun mendatang.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Bima pada tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja;
2. Meningkatkan pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pemenuhan sarana dan prasarana serta SDM yang kompeten secara bertahap





**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BIMA
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama IKU 1 : Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	0	100	100	0	0	0	0	100	
% Capaian	0	142,8%	142,8%	0	0	0	0	142,8%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- BPPMHKP Bima saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan,

optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
 - b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Pada Triwulan II tahun 2025 BPPMHKP Bima hanya melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu :
 - a. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. Kegiatan CBIB dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu UD.Furqan Farm di Kota Bima. Surveilen CBIB ini dilaksanakan oleh inspektur BPPMHKP Bima Bersama Penyuluh Perikanan wilayah Kota Bima. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah pembesaran ikan air tawar di kolam (Kode KBLI 03229) dengan komoditas ikan lele.
- Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A + B + C + D + E + F}{xn} \times 100\%$$

- %X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
- A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Jumlah Unit menerapkan CPIB
- C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- Xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

$$\%X = \frac{A}{xn} \times 100\% = \%X = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :
 - a. 1 Surat Keterangan Hasil Surveilen UD. Furqan Farm
- Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

Akar Masalah
Dalam kegiatan surveilen CBIB pengguna jasa tidak memiliki dokumen kegiatan inspeksi ataupun surveilen yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga tidak ada dokumen lama.
Tindakan yang telah dilaksanakan
1. Pada tanggal 18 Juni 2025 Inspektur Mutu BPPMHKP Bima melakukan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima guna menggali informasi terkait pembudidaya, lokasi pembenihan, dan nelayan di Kota Bima guna melakukan percepatan sertifikasi Primer; 2. Pada tanggal 25 Juni 2025 Inspektur Mutu BPPMHKP Bima telah melaksanakan surveilen CBIB; 3. Pada tanggal 30 Juni 2025 Inspektur Mutu BPPMHKP Bima mendampingi pengguna jasa guna mempercepat penerbitan sertifikat CBIB.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan guna mendapatkan data dan melakukan percepatan sertifikasi primer	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q2 Tahun 2025

I. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi CBIB di Triwulan II Tahun 2025

No.	Nama UPR	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	UD. Furqan Farm	Pembesaran Ikan Air Tawar di kolam	C	ID - CBIB - NB - T - 000728 Tanggal 29 November 2023



Bima, 1 Juli 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Dita Antonisa Wielna

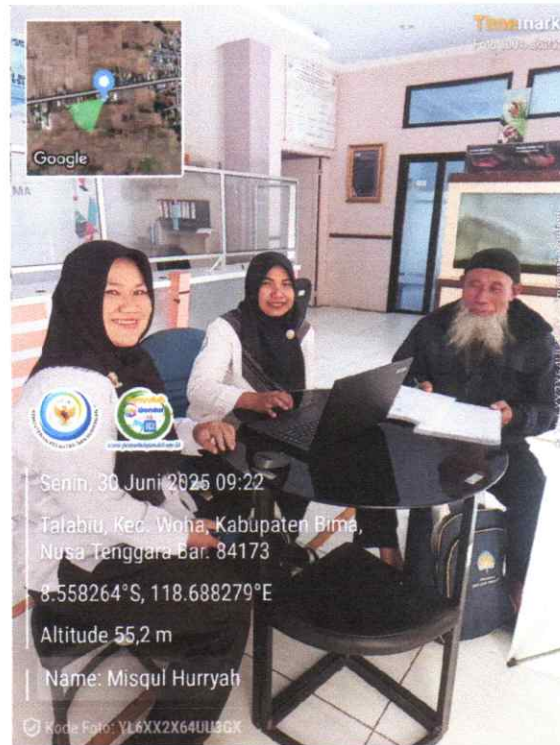
**Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima
18 Juni 2025**



Dokumentasi Kegiatan Surveilien CBIB di UD. Furqan Farm 25 Juni 2025



**Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Percepatan Sertifikasi CBIB
30 Juni 2025**



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BIMA TRIWULAN II TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

Nama IKU 2 : Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q1	Q2	Sm.II		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	0	100	100	0	0	0	0	100	
% Capaian	0	142,8%	142,8%	0	0	0	0	142,8%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2,Tw3 dan Tw4
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

Sertifikasi Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) :

- Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
- Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk produk perikanan adalah suatu sistem jaminan keamanan pangan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi produk perikanan.
- Tujuan HACCP adalah untuk memastikan keamanan pangan produk perikanan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi.

Isu Utama :

1. Sertifikasi HACCP bertujuan untuk memastikan keamanan pangan produk perikanan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi.
2. Produk perikanan rentan terhadap kontaminasi bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan Vibrio, yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.
3. Penggunaan bahan tambahan yang tidak aman atau tidak tepat dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Implikasi :

1. Sertifikasi HACCP dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan yang dihasilkan oleh perusahaan.
2. Sertifikasi HACCP dapat meningkatkan daya saing perusahaan perikanan di pasar domestik dan internasional.
3. Sertifikasi HACCP dapat mengurangi risiko keamanan pangan dan kerugian ekonomi yang terkait dengan produk perikanan yang tidak aman.
4. Sertifikasi HACCP dapat meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan di kalangan perusahaan perikanan dan konsumen.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan ikan (UPI. Upi yang dimaksud antara lain :
 1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
 2. Unit penanganan rumput laut kering;
 3. Gudang beku;
 4. Gudang dingin;
 5. Gudang kering, dan/atau
 6. Miniplant
- Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 1. Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) atau Sertifikat keterampilan di bidang Keamanan Pangan yang setara untuk penanggungjawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil)
 2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019).
 3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Isu Utama :

1. Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 14 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 13 KBLI berpindah perizinan berusaha sektor lainnya dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan ikan.
2. Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini, DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP.
3. Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS.
4. Verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS.
5. Petugas pemeriksa permohonan belum seluruhnya tepat waktu melakukan pemeriksaan setelah rekomendasi diupload pada SKP online

Implikasi :

1. Peningkatan kepercayaan konsumen: SKP dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan oleh fasilitas pengolahan.
 2. Peningkatan daya saing: SKP dapat meningkatkan daya saing fasilitas pengolahan pangan di pasar domestik dan internasional.
 3. Pengurangan risiko: SKP dapat mengurangi risiko keamanan pangan dan kerugian ekonomi yang terkait dengan produk pangan yang tidak aman.
 4. Peningkatan kesadaran akan keamanan pangan: SKP dapat meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan di kalangan fasilitas pengolahan pangan dan konsumen.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen terdiri dari :
 - a. Sertifikasi Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
 - c. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik
 - d. Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance
 - Pada Triwulan II tahun 2025 BPPMHKP Bima terdapat realisasi capaian kinerja berupa Sertifikasi HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

- Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- Xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\% = \%X = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :
 - a. 1 Surat Keterangan Hasil Surveilen PT.Berkat Nisa Sura Bima
- Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

Akar Masalah

1. Dalam kegiatan Surveilen HACCP, pada dasarnya UPRL sudah menerapkan GMP/SSOP serta HACCP secara baik namun masih terdapat beberapa temuan ketidaksesuaian;
2. Permasalahan yang dihadapi pada sertifikasi SKP yaiu kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi untuk memenuhi standar keamanan pangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Menginstruksikan kepada pelaku usaha agar menidaklanjuti semua temuan ketidaksesuaian pada saat surveilan HACCP;
2. Dukungan Pemerintah berupa pemberian kegiatan pelatihan serta pembinaan untuk membantu pelaku usaha agar dapat memenuhi standar sertifikasi.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan pemeriksaan tindakan perbaikan oleh pelaku usaha atas temuan ketidaksesuaian pada saat kegiatan Surveilen HACCP.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q2 Tahun 2025

I. SKHS HACCP di Triwulan II Tahun 2025

No.	Nama UPI	Produk	Grade	Nomor Sertifikat
1	PT BERKAT NISA SURA BIMA	Dried Seaweed	B	1/30.0/SKV/04/25

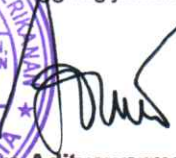
II. SKHS Sertifikasi SKP di Triwulan II Tahun 2025

No.	Nama UPI	Produk	Grade	Nomor Sertifikat
1	CV. TOYO MILI LUMINTU	Ikan Pelagis Beku	A	35741/52/SKP/BK/II/2025
2	CV. TOYO MILI LUMINTU	Chepalopoda Mentah Beku	A	35742/52/SKP/BK/II/2025
3	CV. TOYO MILI LUMINTU	Ikan Demersal Beku	A	35743/52/SKP/BK/II/2025
4	CV. TOYO MILI LUMINTU	Tuna Loin Beku	A	35744/52/SKP/BK/II/2025
5	CV. TOYO MILI LUMINTU	Crustacea Beku	A	35745/52/SKP/BK/II/2025



Bima, 1 Juli 2025

Penanggung jawab Indikator Kinerja


Fitra Adityawarman

DOKUMENTASI SURVEILANCE HACCP PT BERKAT NISA SURA BIMA

18 MARET 2025



**REALISASI CAPAIAN IKK RASIO EKSPOR IKAN DAN HASIL PERIKANAN MEMENUHI SYARAT MUTU DAN
DITERIMA OLEH NEGARA TUJUAN EKSPOR
UPT KIPM : STASIUN KIPM BIMA
TAHUN 2025**

Bulan : April s.d Juni 2025 (Triwulan II)

No.	Uraian IKK	Realisasi			Keterangan
		Jumlah Ekspor	Jumlah Penolakan oleh Negara Tujuan	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu	4	0	100	Selama bulan April s.d Juni 2025 terdapat 4 kali ekspor dan diterima oleh negara tujuan ekspor dianggap memenuhi syarat 100%



Mengetahui
Kepala Stasiun KIPM Bima,

[Signature]
Johnson Petrus

Bima, 01 Juli 2025

Penanggung Jawab IKU,

[Signature]
Fitra Adityawarman

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bima

Nama Unit Kerja : Stasiun KIPM Bima
Periode Laporan : Triwulan II
Tahun : 2025

Uraian IK/IKU	TARGET 2025			REALISASI		
	Tahunan	Semester I	Triwulan II	Tahunan	Semester I	Triwulan II
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bima	87	75	75	-	87.83	87.83

Uraian Capaian Indikator : Realisasi telah mencapai Target pada Triwulan II



Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Bima

Jonison Petrus

Bima, 1 Juli 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Heri Purwanto

STASIUN KIPM BIMA

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM BIMA	6	23.33	93.32 %	35	87.5 %	25	83.33 %	4.5	90 %	87.83	TINGGI



Silakan ketik NIP atau Nan

Cari

Download

i troubleshooting permasalahan IP-ASN bisa dicek pada halaman berikut: [faq-troubleshooting-permasalahan-ip-asn](#)

#	Nama	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan
		Tingkat Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukuman Disiplin	IP		
1	JONISON PETRUS	S-1	25	20	10	-	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
2	KUKUH ANDIAS PURBIANTO	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	S	2	82	TINGGI
3	FITRA ADITYAWARMAN	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
4	DITA ANTONISA WIELNA	D-III	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
5	NURWAHYUNI WIDIASTUTI	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
6	HERI PURWANTO	S-1	25	20	10	-	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI



LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

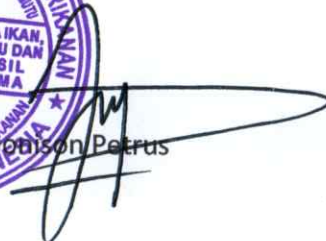
Nama Unit Kerja : Stasiun KIPM Bima
Periode Laporan : Triwulan II
Tahun : 2025

No	Instansi Pemeriksa/Pengawasan	LHP	Tanggal LHP	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Yang Tuntas Ditindaklanjuti
1	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor (outstanding Kontrak 2022) di Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (SKIPM) Bima Provinsi NTB	9 November 2021	2	2
2	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor Tahun 2021 Stasiun KIPM Bima	3 Januari 2022	3	3
3	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Reviu Dokumen untuk Mendukung Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan Perikanan Tahun 2021 di Stasiun KIPM Bima	27 Februari 2022	8	8

4	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Reviu Penyelesaian Pekerjaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2021 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 Maret 2022	3	3
JUMLAH				16	16
CAPAIAN IKU				100%	
$\text{Perhitungan IKU} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi}}{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Telah Tuntas Ditindak Lanjuti}} \times 100\% = \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$					

Uraian Capaian Indikator : Semua hasil pengawasan telah di tindak lanjuti

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Bima



Jonison Petrus



Bima, 1 Juli 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Heri Purwanto



SIDAK KKP
Heri Purwanto

PEMCAWA SAU

BERANDA

MANAGE TLHP

TUTORIAL



HOME | BADAN PPMB/KP | STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

NEW LHP/PENDING



ADMIN PANEL

Data Periode: 01 Jan 2019 s/d 02 Jul 2025

Jumlah Laporan : 4 Dokumen
Jumlah Temuan : 5 Temuan
Jumlah Rekomendasi : 16
Nilai Keuangan : Rp13.816.876

Tuntas : 16 Rekomendasi
Proses : 0 Rekomendasi
Pending : 0 Rekomendasi
Sisa Nilai Keuangan : Rp0

Search

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
1823	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	Pemantauan	R. 534TJ 4HP 556/1/2022	2022-02-27	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan, Pergedaan Barang/Jasa (PBJ) dan Revisi Dokumen untuk Mendukung Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan Perikanan Tahun 2021 di Stasiun KIPM Bima	TUNTAS	Detail
1830	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	Revisi	R. 558TJ 4HP 556/0/2022	2022-03-04	Revisi Penyelesaian Pekerjaan Pemeliharaan Nila Gedung dan Bangunan Tahun 2021 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKPM) Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	TUNTAS	Detail
1772	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	Pemantauan	R. 13TJ 4HP 550/1/2022	2022-01-03	Hasil Pemantauan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor Tahun 2021 Stasiun KIPM Bima	TUNTAS	Detail
1893	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	Pemantauan	R. 1084TJ 4HP 556/0/2021	2021-11-09	Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor (outstanding Kontrak 2022) di Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (SKPM) Bima Provinsi NTB	TUNTAS	Detail

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous

Next

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA
TRIWULAN II TAHUN 2025



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II.....	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden.....	6
BAB III.....	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. 14	
2. Hasil Pengolahan Data SKM	15
3. 15	
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/1301> yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	April 2025	8
2.	Pengumpulan Data	April-Juni 2025	66
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juli 2025	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juli 2025	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan IV tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima dalam kurun waktu triwulan I tahun 2025 adalah sebanyak 12 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 19 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 19 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	12	63%
		Perempuan	7	37%
2	Usia	<25	0	0%
		25-45	3	16%
		46-60	13	68%
		>60	4	21%
3	Pendidikan	SD	1	5%
		SMP	3	16%
		SMA	8	42%
		D3	0	0%
		S1	7	37%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	1	5%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	15	79%
		Pegawai Swasta	0	0%
		Wirausaha Non KKP	2	11%
		Pelajar/Mahasiswa	1	5%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	2	11%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	4	21%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	5	26%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	6	32%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	2	11%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

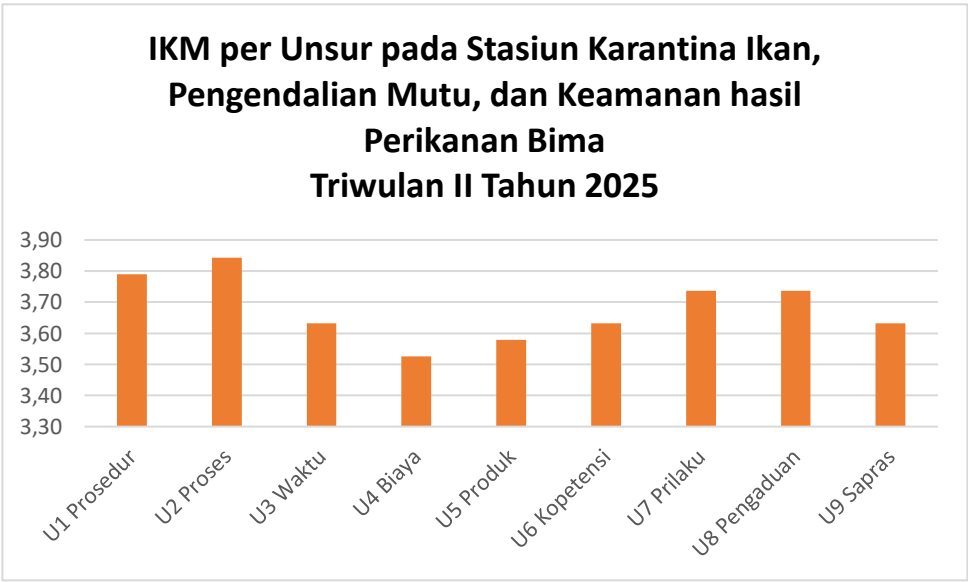
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,79	3,84	3,63	3,53	3,58	3,63	3,74	3,74	3,63
Kategori	A	A	A	B	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	91,96 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Biaya/Tarif mendapatkan nilai terendah yaitu 3,53. Selanjutnya Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan mendapatkan nilai 3,58 adalah nilai terendah kedua dan Waktu Penyelesaian yang mendapatkan nilai 3,63 adalah nilai terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur, mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,84. Selanjutnya Persyaratan 3,79 dan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan mendapatkan nilai yaitu 3,74.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, tidak diperoleh aduan yang menjadi perhatian dan dipergunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Biaya/Tarif dalam pelaksanaan sertifikasi pelayanan SKIPM Bima tidak ada dipungut biaya atau tarif bagi pengguna jasa. Namun kendalanya kemungkinan ada pada saat pengguna jasa menyediakan minum atau saat sampel yang diambil oleh petugas dirasa berat oleh pengguna jasa sehingga perlu dijelaskan kegunaan pengambilan sampel dan harus sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak memberatkan pengguna jasa
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan bagi petugas perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait produk spesifikasi jenis pelayanan yang ada di SKIPM Bima.
- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun kendala jaringan dan kendala pada sistem aplikasi yang menghambat proses pelayanan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

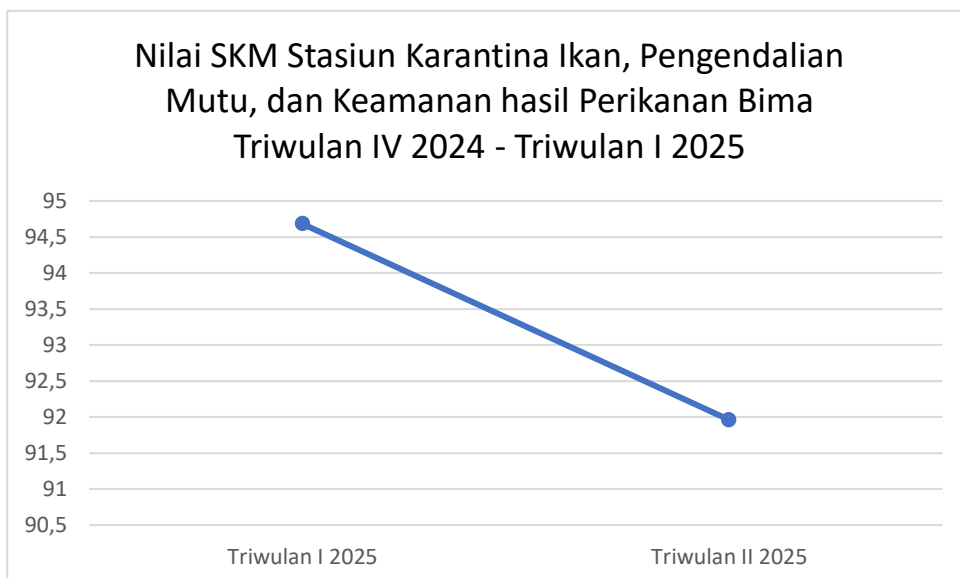
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal April/Mei/Juni 2025 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan II 2025)			Penanggung Jawab
			Juli	Agustus	September	
1	Biaya/Tarif	Sebelum melakukan pelayanan publik di kantor ataupun di lapangan petugas pelayanan harus menjelaskan biaya yang mungkin timbul dari proses pelayanan tersebut dan apabila tidak ada pembayaran petugas juga harus menjelaskan bahwa tidak ada biaya dan petugas disarankan menanyakan kepada pengguna jasa apabila menyediakan hidangan ditanyakan apakah keberatan atau tidak	√	√	√	Tim Pelayanan Publik

2	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Pelatihan internal atau mengikuti pelatihan during atau luring mengenai spesifikasi produk layanan dari Badan Mutu KKP			√	Tim Pelayanan Publik
3	Waktu Penyelesaian	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, pemberian sanksi kepada petugas layanan dsb)			√	Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi sedikit penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan I 2025 sebesar 94,68 dan triwulan II 2025 sebesar 91,96 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan II mulai April hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 91,96.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Biaya/Tarif , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, dan Waktu Penyelesaian.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan dan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan.

Bima, 01 Juli 2025

**Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan hasil Perikanan Bima**



[Signature]
Suhaimon Petrus, S. St.Pi
NIP. 198006122005021001

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Data Layanan

Pilih Layanan

☐ Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)

☐ Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Eksport)

☐ Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air

☐ Penerbitan Sertifikat Kebijakan Pengkukuhan

☐ Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pemberihan Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik

Data Responden

Waktu Survey

19-Feb-2025 13:19

Nama

Jenis Usaha

☐ Perseorangan

☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

☐ Pria/Laki-laki

☐ Wanita/Perempuan

Usia

☐ < 25 Tahun

☐ 25 s/d 45 Tahun

☐ 46 s/d 60 Tahun

☐ > 60 Tahun

Pendidikan

☐ SD

☐ SMP

☐ SMA

☐ D3

☐ S1

☐ S2

☐ S3

Pekerjaan

☐ ASN

☐ TNI/Polri

☐ Pelaku Usaha KKP

☐ Pegawai Swasta

☐ Wirasaha Non KKP

☐ Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
(pajak andabadan hukum/genesis dapat memahami persyaratan pelayanan Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP yang tersedia diurla juga BOPN)

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

6. Bagaimana **kecepatan respon** (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat Cepat

☐ Cepat

☐ Kurang cepat

☐ Lambat

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tidak lanjut)?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kuualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (sikap, keterampilan dan penampilan)

☐ Sangat Baik

☐ Baik

☐ Kurang Baik

☐ Tidak Baik

Kritik dan Saran

*) Harus diisi minimal 3 kata

Submit form

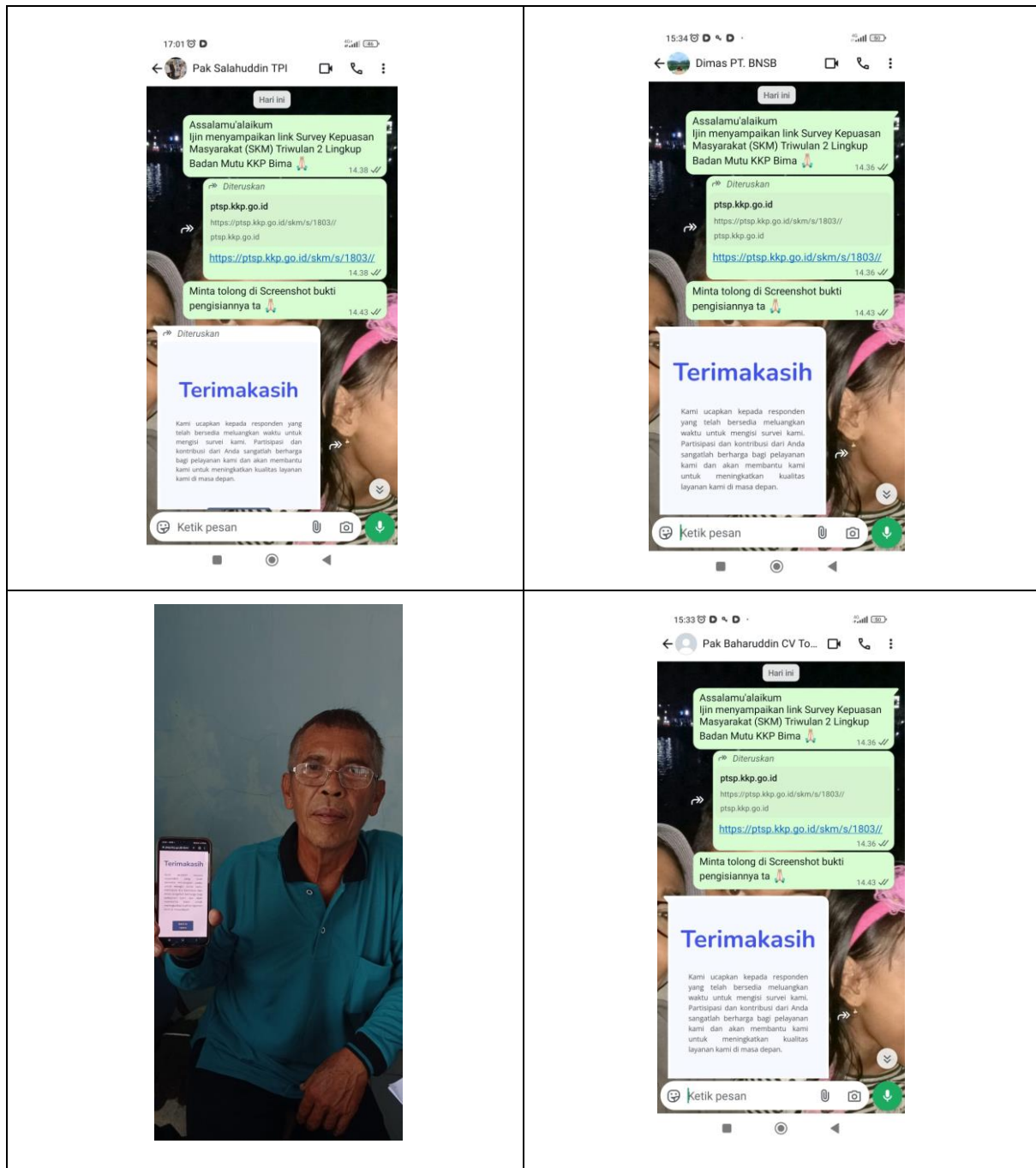
*) Petisian anda akan mengisi seluruh pertanyaan sebelum submit

2. Hasil Pengolahan Data SKM

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)																	
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA																	
PERIODE TRIWULAN II 2025																	
No	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI UNSUR PELAYANAN								KRITIK DAN SARAN	NILAI PER JENIS LAYANAN	NRR PER JENIS LAYANAN	
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8				
1	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	46-60	SMA	P.ULKUP	4	4	3	3	4	4	4	4	4	Terimakasih atas bimbingannya	94,44	91,96
2	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	46-60	SMA	P.ULKUP	4	4	4	3	4	4	4	4	4	Bravo untuk team dari BKPM	94,44	
3	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	46-60	SMA	P.ULKUP	4	4	4	3	4	4	3	4	4	Bravo untuk timmyridi di Bima	94,44	
4	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	<25	SI	Pelajar/Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	pelayanan, sikap, keterampilan dan penampilan sangat baik	75,00	
5	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu	Laki-laki	46-60	SMA	P.ULKUP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	pelayanan sangat tepat	75,00	
6	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu	Laki-laki	>60	SI	P.ULKUP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terimakasih atas pelayanannya	100,00	
7	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	46-60	SI	P.ULKUP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	mantap Badan Mutu Bima	100,00	
8	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Perempuan	46-60	SMA	P.ULKUP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bravo siap mntap	91,67	
9	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	46-60	SI	P.ULKUP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat baik, mohon diperhatikan	91,67	
10	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	46-60	SMA	Wirausaha N	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Kami sangat terimakasih buat para petugas, pelayannya sangat ramah, sabar	91,67	
11	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	46-60	SMA	Wirausaha N	4	4	4	4	4	4	4	3	4	Sangat baik dan cepat	94,44	
12	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Laki-laki	46-60	SD	P.ULKUP	4	4	4	3	3	3	3	4	3	Penerbitan pelayanannya yang baik	86,11	
13	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Perempuan	46-60	SMP	P.ULKUP	4	4	3	3	3	3	4	3	3	Sangat kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun	83,33	
14	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Laki-laki	46-60	SMP	P.ULKUP	4	4	4	4	3	4	4	4	3	Kami selalu berharap bimbingan untuk usaha kami, lebih baik kedepannya	94,44	
15	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Laki-laki	25-45	SI	P.ULKUP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan penerbitan sertifikat sudah sesuai	100,00	
16	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Laki-laki	25-45	SMA	P.ULKUP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan kegiatan sudah sangat	100,00	
17	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Laki-laki	46-60	SMP	P.ULKUP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya agar lebih baik	100,00	
18	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	Laki-laki	>60	SI	P.ULKUP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terimakasih atas pelayannya	100,00	
19	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	Perempuan	25-45	SI	ASN	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Lebih semangat lagi dalam pelayanan yang terbaik	80,56	
Jumlah Rata-Rata Per-unsur						72	73	69	67	68	69	71	69				
Rata-Rata Per-unsur						3,78	3,84	3,63	3,53	3,58	3,63	3,74	3,63				
Nilai Indeks Per-unsur						0,42	0,43	0,40	0,39	0,40	0,40	0,42	0,40				
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat						91,96											
SANGAT BAIK																	
91,96																	

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	12	63%
		Perempuan	7	37%
2	Usia	Dibawah 25	0	0%
		25-45	3	16%
		46-60	13	68%
		>60	4	21%
				0%
3	Pendidikan	SD	1	5%
		SMP	3	16%
		SMA	8	42%
		D3	0	0%
		S1	7	37%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	1	5%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	15	79%
		Pegawai Swasta	0	0%
		Wirausaha Non KKP	2	11%
		Pelajar/Mahasiswa	1	5%
				0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/	2	11%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Pro	4	21%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	5	26%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	6	32%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	2	11%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Triwulan I Tahun 2025



**Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
hasil Perikanan Bima
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima periode triwulan I tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan I Tahun 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	100,00	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	100,00	A
3	Waktu Penyelesaian	89,58	A
4	Biaya/Tarif	95,83	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	95,83	A
6	Kompetensi Pelaksana	89,58	A
7	Perilaku Pelaksana	93,75	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	93,75	A
9	Sarana dan Prasarana	93,75	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk

memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan II 2025)			Penanggung Jawab
			April	Mei	Juni	
1	U3 – Waktu Penyelesaian	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, pemberian sanksi kepada petugas layanan dsb)		√		Tim Pelayanan Publik
2	U6 – Kompetensi pelayanan	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb)			√	Tim Pelayanan Publik
3	U7 - Perilaku petugas	Rapat Internal Petugas Pelayanan dengan pembahasan bagaimana cara berperilaku yang baik dalam penyampaian pelayanan publik terhadap pengguna jasa	√			

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, pemberian sanksi kepada petugas layanan dsb)	Sudah	Mendiskusikan janji layanan apasaja yang kana dibuat		Mencari referensi janji layanan untuk jenis layanan baru di Badan Mutu KKP Bima
2	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb)	Sudah	Melakukan pembahasan terkait kendala dan percepatan penyelesai masalah		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

3	Rapat Internal Petugas Pelayanan dengan pembahasan bagaimana cara berperilaku yang baik dalam penyampaian pelayanan publik terhadap pengguna jasa	sudah	In haouse training terkait bagaimana cara penyampaian pelayanan publik terhadap pengguna jasa		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
---	---	-------	---	---	-------------------------------------

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

N o	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggu ng Jawab	Stakeholder Terkait
1	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, pemberian sanksi kepada petugas layanan dsb)	Rapat dan pelatihan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima
2	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb)	Rapat dan pelatihan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima
3	Rapat Internal Petugas Pelayanan	Rapat dan pelatihan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Stasiun Karantina Ikan,

	dengan pembahasan bagaimana cara berperilaku yang baik dalam penyampaian pelayanan publik terhadap pengguna jasa				Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima
--	--	--	--	--	--

Bima, 01 Juli 2025

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima



Ision Petrus, S. St.Pi
NIP. 198006122005021001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 3095/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2025 10 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2025 adalah 88, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan II Tahun 2025 adalah **94,42** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,78** dan mutu pelayanan diperoleh **"A"** kategori **"Sangat Baik"**. Berikut merupakan tabel perolehan tiap unsur pelayanan.
2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) UPP, dan 1 (satu) UPP mendapatkan kategori baik. UPT SKIPM Padang, SKIPM Merak, dan SKIPM Pekanbaru memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah dari total 47 UPT adalah SKIPM Tanjung Balai Asahan, SKIPM Aceh, dan SKIPM Mamuju.

3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 14 layanan terdapat 13 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 1 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (87,50).
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur	Nilai
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	94,92
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	94,88
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	94,02
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	94,87
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	94,77
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	93,37
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	93,72
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	95,51
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	93,68

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 3095/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2025

Tanggal : 10 Juli 2025

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hari Maryadi

Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Stasiun KIPM Padang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A	Sangat Baik	10
2	Stasiun KIPM Merak	99.73	99.73	100.00	99.73	99.19	100.00	99.73	99.73	100.00	99.76	A	Sangat Baik	93
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	99.51	99.51	99.51	98.04	99.51	98.04	99.02	99.02	98.04	98.91	A	Sangat Baik	51
4	Stasiun KIPM Gorontalo	98.31	98.99	98.65	98.65	98.31	98.31	98.65	98.65	98.65	98.57	A	Sangat Baik	74
5	Balai KIPM Banjarmasin	98.89	98.58	98.26	98.10	98.42	98.42	98.58	98.58	98.58	98.49	A	Sangat Baik	158
6	Balai KIPM Ambon	99.00	99.33	97.67	97.33	98.67	98.33	98.33	99.00	98.33	98.44	A	Sangat Baik	75
7	Stasiun KIPM Sorong	99.60	99.19	98.79	89.52	100.00	98.79	99.19	100.00	97.98	98.12	A	Sangat Baik	62
8	Balai KIPM Jayapura	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	A	Sangat Baik	9
9	Stasiun KIPM Pontianak	99.12	97.37	98.68	97.81	99.12	95.18	94.74	95.61	96.05	97.08	A	Sangat Baik	57
10	Balai KIPM Medan I	97.06	97.06	97.06	96.32	97.06	96.32	97.06	97.79	97.06	96.98	A	Sangat Baik	34
11	Balai KIPM Jakarta II	97.45	97.96	96.43	96.94	95.92	97.45	97.45	97.45	95.41	96.94	A	Sangat Baik	49
12	Stasiun KIPM Merauke	95.59	97.06	94.12	94.12	97.06	98.53	97.06	100.00	98.53	96.90	A	Sangat Baik	17
13	Balai KIPM Tanjung Pinang	96.96	95.75	96.56	97.27	96.26	95.55	95.14	97.87	96.46	96.42	A	Sangat Baik	247
14	Stasiun KIPM Ternate	96.30	96.30	96.30	96.30	96.30	95.37	95.37	96.30	96.30	96.09	A	Sangat Baik	27

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
15	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	96.32	96.32	96.32	95.59	95.59	95.59	95.59	97.06	96.32	96.08	A	Sangat Baik	34
16	Balai KIPM Balikpapan	96.25	96.25	96.25	95.63	95.63	95.00	95.94	96.25	95.63	95.87	A	Sangat Baik	80
17	Balai KIPM Surabaya II	98.42	97.97	97.97	98.42	97.52	95.72	95.50	98.65	82.43	95.85	A	Sangat Baik	111
18	Stasiun KIPM Jambi	97.56	94.51	96.95	96.95	96.34	90.85	93.90	97.56	96.34	95.66	A	Sangat Baik	41
19	Balai KIPM Mataram	96.55	96.55	95.69	96.98	94.83	94.40	94.40	96.12	94.83	95.59	A	Sangat Baik	58
20	Balai KIPM Entikong	95.63	96.88	96.25	95.00	95.63	93.13	94.38	96.25	95.00	95.35	A	Sangat Baik	40
21	Stasiun KIPM Palu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78.41	100.00	78.41	95.20	A	Sangat Baik	22
22	Stasiun KIPM Tahuna	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	A	Sangat Baik	5
23	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	95.54	95.54	95.54	93.75	93.75	94.64	93.75	96.43	95.54	94.94	A	Sangat Baik	28
24	Stasiun KIPM Bengkulu	95.24	92.86	96.43	95.24	96.43	95.24	94.05	94.05	94.05	94.84	A	Sangat Baik	21
25	Stasiun KIPM Medan II	95.33	95.00	94.00	96.00	94.33	94.67	94.33	94.67	94.33	94.74	A	Sangat Baik	75
26	Stasiun KIPM Bau-Bau	95.45	93.18	95.45	95.45	95.45	93.18	95.45	95.45	93.18	94.70	A	Sangat Baik	22
27	Stasiun KIPM Kupang	95.04	94.86	94.68	93.44	94.68	94.68	94.33	95.04	94.15	94.54	A	Sangat Baik	141
28	Balai KIPM Manado	94.55	94.09	95.00	96.36	95.45	92.27	94.09	94.09	92.73	94.29	A	Sangat Baik	55
29	Balai KIPM Tarakan	94.50	96.00	95.00	94.50	94.50	93.50	93.00	91.50	93.50	94.00	A	Sangat Baik	50

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
30	Stasiun KIPM Cirebon	93.75	93.36	94.14	94.92	94.14	92.97	93.75	94.14	93.75	93.88	A	Sangat Baik	64
31	Stasiun KIPM Kendari	95.54	95.54	93.75	94.64	92.86	91.96	95.54	91.96	92.86	93.85	A	Sangat Baik	28
32	Balai Uji Standar KIPM	95.19	94.23	94.23	94.23	94.23	92.31	92.31	92.31	95.19	93.80	A	Sangat Baik	26
33	Balai KIPM Denpasar	92.76	93.28	93.45	93.10	93.10	93.79	93.62	94.14	94.14	93.49	A	Sangat Baik	145
34	Stasiun KIPM Palembang	89.22	96.57	85.29	98.53	96.81	84.56	93.87	98.53	97.30	93.41	A	Sangat Baik	102
35	Balai Besar KIPM Makassar	93.25	93.10	91.84	93.92	93.43	91.62	92.32	93.51	92.54	92.84	A	Sangat Baik	674
36	Stasiun KIPM Batam	95.12	96.95	95.12	96.34	95.73	90.24	82.93	96.34	85.37	92.68	A	Sangat Baik	41
37	Stasiun KIPM Bandung	94.57	91.30	91.30	94.57	94.57	92.39	88.04	91.30	92.39	92.27	A	Sangat Baik	23
38	Stasiun KIPM Yogyakarta	92.11	93.42	86.84	92.11	93.42	89.47	94.74	94.08	93.42	92.18	A	Sangat Baik	38
39	Stasiun KIPM Bima	94.74	96.05	90.79	88.16	89.47	90.79	93.42	93.42	90.79	91.96	A	Sangat Baik	19
40	Balai KIPM Semarang	91.38	91.38	91.09	91.95	91.09	88.79	89.37	92.24	90.23	90.84	A	Sangat Baik	87
41	Balai Besar KIPM Jakarta I	94.70	89.77	88.26	90.15	88.64	90.15	88.64	90.91	91.67	90.32	A	Sangat Baik	66
42	Balai KIPM Lampung	89.38	93.75	86.88	90.00	88.13	88.75	91.25	91.25	89.38	89.86	A	Sangat Baik	40
43	Stasiun KIPM Palangkaraya	92.86	92.86	88.10	86.90	91.67	88.10	89.29	90.48	88.10	89.81	A	Sangat Baik	21
44	Balai KIPM Surabaya I	91.10	89.41	89.83	91.31	90.47	88.14	88.35	89.41	88.98	89.67	A	Sangat Baik	118

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
45	Stasiun KIPM Mamuju	88.89	91.67	88.89	86.11	86.11	91.67	88.89	88.89	91.67	89.20	A	Sangat Baik	9
46	Stasiun KIPM Aceh	88.75	91.25	90.00	90.00	91.25	86.25	86.25	87.50	87.50	88.75	A	Sangat Baik	20
47	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	87.11	86.84	86.84	86.84	86.84	86.84	86.58	100.00	86.58	88.27	B	Baik	95

Hasil Pelaksanaan SKM Berdasarkan Produk Layanan BPPMHKP

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air	271	3,72	3,87	3,68	3,83	3,83	3,65	3,79	3,87	3,78	94,51	A	Sangat Baik
2	Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik
3	Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif	8	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,75	3,75	3,75	4,00	97,92	A	Sangat Baik
4	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik	39	3,85	3,85	3,79	3,79	3,79	3,79	3,74	3,82	3,64	94,66	A	Sangat Baik
5	Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik	5	3,40	3,80	4,00	3,60	3,80	3,40	3,80	4,00	3,20	91,67	A	Sangat Baik
6	Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	29	3,86	3,79	3,79	3,72	3,72	3,62	3,59	3,79	3,83	93,68	A	Sangat Baik
7	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik	4	3,75	3,75	3,75	4,00	4,00	3,75	3,75	3,75	3,75	95,14	A	Sangat Baik
8	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	8	3,63	3,50	3,63	3,38	3,50	3,38	3,38	3,63	3,50	87,50	B	Baik
9	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	107	3,80	3,75	3,77	3,79	3,78	3,74	3,82	3,80	3,67	94,21	A	Sangat Baik

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
10	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	225	3,67	3,64	3,56	3,68	3,67	3,61	3,60	3,66	3,62	90,90	A	Sangat Baik
11	Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	9	3,67	3,67	3,56	3,33	3,56	3,33	3,56	3,67	3,67	88,89	A	Sangat Baik
12	Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	2092	3,83	3,82	3,81	3,83	3,82	3,79	3,78	3,84	3,78	95,30	A	Sangat Baik
13	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	539	3,75	3,72	3,68	3,71	3,71	3,62	3,67	3,79	3,67	92,54	A	Sangat Baik
14	Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)	25	3,88	3,80	3,80	3,88	3,84	3,84	3,84	3,88	3,84	96,11	A	Sangat Baik
SELURUH LAYANAN BPPMHKP		3362	3.80	3.80	3.76	3.79	3.79	3.73	3.75	3.82	3.75	94.42	A	Sangat Baik

